



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI**

RENCANA AKHIR RENCANA STRATEGIS [RENSTRA] 2025-2029

**DINAS PERHUBUNGAN
[DISHUB]**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN..... 1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 1

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2030 1

3.2 STRATEGI RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2030..... 4

3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPERIDA KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029..... 4

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 1

4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 1

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 44

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030..... 102

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030..... 105

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun.....105

2030.....105

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029** dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang berfungsi sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun sebagai bentuk tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029.

Sektor perhubungan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta menjamin kelancaran arus barang dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman, tertib, terjangkau, serta berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari kontribusi, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, kami berharap dokumen **Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029** ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam upaya mewujudkan sistem transportasi daerah yang andal, terpadu, dan berdaya saing tinggi guna mendukung visi pembangunan Kabupaten Sigi yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Sigi, 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIGI,**

DODOT TINARSO, S.Sos. , MT
NIP. 197011131990121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor perhubungan memegang peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memperkuat integrasi antar moda transportasi. Seiring dengan dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap pelayanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, dan terjangkau terus meningkat. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perhubungan, dituntut untuk melakukan transformasi pelayanan dan peningkatan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa organisasi kerja perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 adalah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang mengacu pada beberapa dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) daerah, dokumen perencanaan jangka panjang daerah serta dokumen perencanaan jangka menengah baik provinsi maupun nasional, diantaranya yaitu dokumen Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Perhubungan provinsi Sulawesi Tengah, RPJMD Kabupaten Sigi, dokumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi, dokumen KLHS, serta SDGs.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi periode 2025-2029 juga telah mengintegrasikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) yakni Tujuan 9 yaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Adapun kebijakan yang dilaksanakan melalui Peningkatan Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan (2005 – 2025);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman Dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946, Pasal 18 ayat (6);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 160-104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
5. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6133)
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Master plan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 26);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 28);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Perhubungan (Lima Tahunan) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Perhubungan di Kabupaten Sigi. Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi adalah:

1. Mendorong pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah daerah;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai tolok ukur penilaian kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahunan;
3. Sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan, fungsi Renstra Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Perhubungan.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, struktur organisasi Dinas Perhubungan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan

2.2 Sumber daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan

Memuat tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Pada Dinas Perhubungan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Menguraikan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Perhubungan provinsi.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenSigi

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari:1) gambaran pelayanan Dinas Perhubungan; 2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3) sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perhubungan tahun rencana.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan

4.4 Target keberhasilan

4.5 Target kinerja

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan perhubungan dan tugas pembantuan diberikan kepada Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dibidang perhubungan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;
 - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Tugas dan Fungsi dari :

Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan membantu Bupati merumuskan, melaksanakan, hingga evaluasi dan pelaporan kebijakan serta melaksanakan administrasi dibidang perhubungan serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;

- c. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- g. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- h. pengelolaan urusan kepegawaian;
- i. pengelolaan data dan informasi;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan umum;
- l. pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan aset serta pelaporan.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- b. menyelenggarakan administrasi dan penatausahaan keuangan;
- c. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- f. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan aset;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Uraian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan umum;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
- e. melaksanakan urusan persuratan;
- f. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- g. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- e. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, penetapan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang lalu lintas.

Uraian tugas Seksi Lalu Lintas meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas;
- d. menyiapkan bahan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten;
- e. menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- f. menyiapkan bahan penyediaan perlengkapan jalan, sungai dan danau di dalam Daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, sungai dan danau di dalam Daerah;
- h. menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas;
- k. Menyiapkan bahan dan analisa kebutuhan objek pelayanan bagi masyarakat dalam Daerah baik objek perparkiran dan penyeberangan.
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang angkutan.

Uraian tugas Seksi Angkutan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan;
- d. menyiapkan bahan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;
- e. menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
- f. menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam Daerah;

- g. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dan/ atau izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
- h. menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- i. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dan/ atau izin usaha angkutan danau dan sungai bagi orang perseorangan dan badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- j. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dan/ atau izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
- k. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dan/ atau izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- l. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dan/ atau izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
- m. menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana.

Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- c. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- e. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
- b. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana.

Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana;
- d. menyiapkan bahan penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau;
- e. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dan/ atau izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- f. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dan/ atau izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
- g. melaksanakan pendataan dan inventarisasi prasarana;
- h. menyusun draf regulasi penentuan lokasi dan penempatan prasarana;
- i. melaksanakan survei lokasi, perencanaan dan pembangunan prasarana;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengoperasian dan perawatan prasarana. Uraian tugas Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengoperasian dan perawatan prasarana;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengoperasian dan perawatan prasarana;
- d. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dan/ atau izin pengoperasian atau pengembangan pelabuhan sungai dan danau;
- e. melaksanakan penyiapan rencana pengoperasian dan perawatan prasarana;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengoperasian dan perawatan prasarana;
- g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pengoperasian dan perawatan prasarana;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- c. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- e. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri atas:

- a. Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

Uraian tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
- d. menyiapkan data dan bahan dokumen teknis operating system terintegrasi dengan aplikasi pelayanan berdasarkan status lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan dalam wilayah;
- e. menyiapkan bahan kajian penyusunan rencana pengembangan pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul transportasi (bandara, pelabuhan/dermaga, stasiun, dan terminal) di kawasan kota;
- f. menyiapkan bahan sosialisasi/kampanye indikator keamanan, kenyamanan dan informasi pemaduan moda dengan memberikan pelayanan bantuan, saran dan informasi bersama instansi terkait secara berkala di wilayah daerah;
- g. melaksanakan survey pengumpulan data pemaduan moda transportasi perkotaan di wilayah daerah;
- h. melaksanakan penyusunan pengukuran kinerja transportasi perkotaan saling berintegrasi di wilayah daerah;
- i. menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan teknologi transportasi intelligent transport system (ITS) antar zona wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas area, kondisi fisik jalan dan ekonomi wilayah dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- j. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi kerjasama dengan pihak lainnya terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi transportasi;
- k. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi pengkajian dan penerapan teknologi sistem sarana dan prasarana transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi informasi dan teknologi terkait hal lainnya;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan

- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

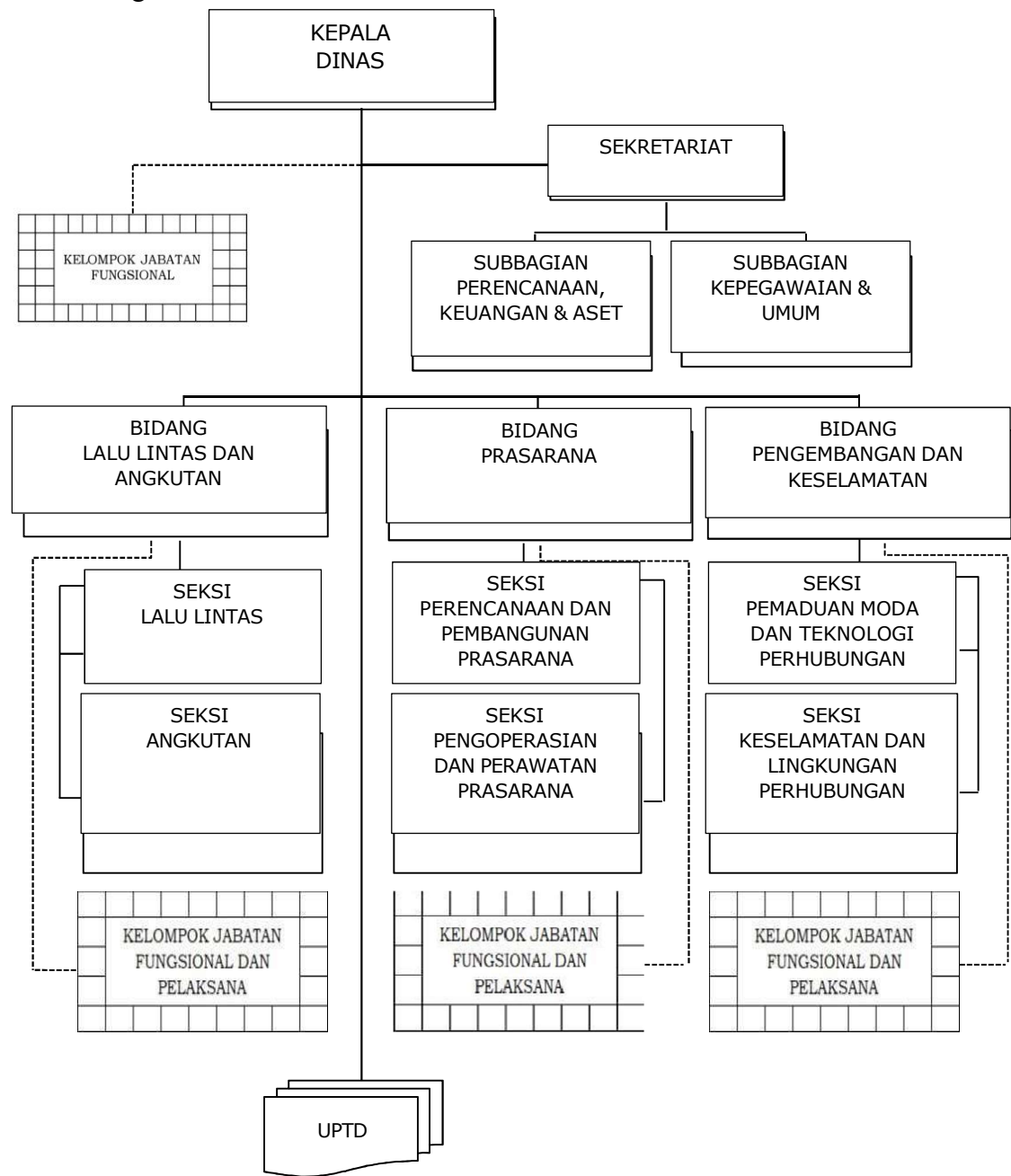
Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang keselamatan dan pengembangan lingkungan perhubungan.

Uraian tugas Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang keselamatan dan pengembangan lingkungan perhubungan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan dan pengembangan lingkungan perhubungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan kabupaten;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan audit dan inspeksi laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- f. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- g. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan danau;
- h. fasilitasi penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan danau;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan;
- j. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan aksi keselamatan lalu lintas pada angkutan jalan, sungai dan danau yang memenuhi persyaratan perundang – undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan uji emisi sepeda motor dan uji emisi angkutan umum/mobil penumpang bersama instansi terkait di wilayah zona tertentu;
- l. Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan jaringan transportasi ramah lingkungan di wilayah zona tertentu;
- m. Melaksanakan kebijakan teknis keselamatan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas area dengan kepadatan pengendara di wilayahnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mulai melakukan tindakan terhadap kemungkinan untuk dilakukan penanganan darurat pada kawasan tersebut;
- n. Melaksanakan sosialisasi / kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai dan danau secara rutin bersama instansi terkait pada lokasi-lokasi rawan kecelakaan di wilayah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- o. Melaksanakan penegakan hukum dan penindakan bersama instansi terkait yang berkelanjutan dan standar-standar peraturan yang dikombinasikan dengan kesadaran agar terciptanya masyarakat tertib berlalu -lintas;
 - p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

- 1) Dinas Pehubungan Kabupaten Sigi hingga tahun 2025 jumlah pegawai berdasarkan ASN dan Non ASN sebanyak 93 orang, sebagaimana pada tabel berikut :

No	Jabatan	ASN					Non	Jumlah
		Gol.I	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Gol.IX	ASN	
1	Kepala	0	0	0	1	0	0	1
2	Sekretaris	0	0	0	1	0	0	1
3	Kabid	0	0	0	3	0	0	3
4	Kasubag	0	0	2	0	0	0	2
5	Kasubid	0	0	7	0	0	0	7
6	Fungsional	0	0	0	1	0	0	1
7	Pelaksana/ Administratif	0	18	16	0	0	0	0
8	Tenaga Kontrak	0	0	0	0	0	44	44
	Jumlah	0	18	25	6	0	44	93

2) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal dapat dirinci sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	13	2	26	11	52
3	D2	0	1	0	0	1
4	D3	8	0	0	0	8
5	S1	17	7	3	4	31
6	S2	2	0	0	0	2
7	S3	0	0	0	0	0

3) Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin dapat dirinci sebagai berikut :

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
	ASN:			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	16	3	19
3	Golongan III	19	6	25
4	Golongan IV	5	1	6
	NON ASN:	29	15	44

4) Berdasarkan Jabatan Struktural berdasarkan golongan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jabatan	Golongan						Jumlah
1	2	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	
	Struktural:							
1	Kepala	0	0	0	0	0	1	1
2	Sekretaris	0	0	0	0	1	0	1
3	Kabid	0	0	0	3	0	0	3
4	Kasubag	1	0	1	0	0	0	2
5	Kasubid	0	2	5	0	0	0	7
	Jumlah	0	2	6	3	1	1	13

2.2.2. Asset/Modal

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Asset Dinas Tahun 2025 - 2029.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah	Keterangan
			ZBaik	Rusak		
	2	3	4	5	6	7
1	Lap Top	Unit	Baik		1	Belanja Lap Top
2	Rambu Jalan	Meter	Baik		1.500	Pembangunan Marka Jalan
3	Lap Top	Unit	Baik		1	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	Baik		1	Pengadaan Printer
5	Rambu Bersuar lainnya (dst)	Meter	Baik		400	Pembangunan Marka Jalan
6	AC Spit	Unit	Baik		1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga / Pendingin Ruangan (AC)
7	Kursi Pejabat Pejabat Eselon IV	Unit	Baik		1	Pengadaan kursi Kerja Pejabat Eselon IV
8	Lap Top	Unit	Baik		1	Belanja Laptop For Bidang SAPRAS
9	Rambu tidak bersuar lainnya	Unit	Baik		1	Pembangunan Portal
10	Rambu – Rambu Lalin Darat Lainnya	Buah	Baik		13	Belanja modal rambu – rambu lalulintas jalan

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2024, data diolah pada tahun 2025

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

A. Bidang Perhubungan

Permasalahan dan tantangan di bidang Perhubungan meliputi permasalahan dan tantangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

1. Lalu Lintas dan Angkutan

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan moda lain. Adapun permasalahan yang terjadi, adalah sebagai berikut ini :

- 1) Pertumbuhan kendaraan pribadi lebih cepat daripada kapasitas jalan; kurangnya transportasi umum yang memadai.
- 2) Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi.
- 3) Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum, namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah.
- 6) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat disiplin pengguna jalan, kurangnya kualitas dan kuantitas rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.
- 7) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat :
 - a) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
 - b) Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;
 - c) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
 - d) Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;
- 8) Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
 - a) Belum mantapnya tatanan transportasi wilayah dan lokal;
 - b) Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antar lembaga pemerintah dibidang LLAJ baik di pusat dan daerah;
 - c) Masalah pendidikan dan lawenforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalulintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran batas muatan, perlengkapan kendaraan, kelengkapan surat, dan pelanggaran rambu jalan. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas;

- d) Masih terbatasnya pengembangan SDM dibidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- e) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat tundaan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan.
- f) Rendahnya kualitas angkutan umum akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator angkutan umum, , serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

2. Prasarana

- 1) Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan prasarana jalan
- 2) Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan;
- 3) Prasarana pendukung (halte, terminal, stasiun) kurang terawat dan tidak ramah pengguna.
- 4) Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan.
- 5) Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi dengan rencana pengembangan wilayah serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengembangan prasarana dan sarana transportasi.

3. Keselamatan dan Pengembangan

- 1) Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali yang menyebabkan kemacetan, polusi, dan tekanan terhadap ruang kota.
- 2) Kurangnya sarana prasarana keselamatan
 - a. Minimnya rambu-rambu, marka jalan, lampu lalu lintas yang fungsional.
 - b. Fasilitas untuk pejalan kaki dan difabel yang belum memadai.
- 3) Masih banyak kendaraan yang melanggar batas muatan, yang mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
- 4) Masih terbatasnya konektivitas antarmoda dan antarwilayah serta Infrastruktur transportasi yang belum merata (khususnya di daerah 3T - Terdepan, Terluar, Tertinggal).
- 5) Transportasi publik yang belum aman dan nyaman yang dimaksud seperti kecelakaan angkutan umum, kurangnya uji kelaikan kendaraan (ramp check), dan pelatihan sopir yang belum memadai.
- 6) Minimnya pengawasan dan penegakan hukum
 - a. Kurangnya personel pengawasan.

- b. Belum optimalnya penerapan sistem tilang elektronik (ETLE).
- 7) Pengembangan transportasi seringkali membutuhkan kerja sama lintas sektor (PU, Kepolisian, Bappeda, dll), namun koordinasinya masih lemah.

Berdasarkan situasi dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi khususnya, yang semakin berkembang, khususnya di bidang transportasi, maka perlu dilakukan identifikasi Analisis Renstra Kementerian / Lembaga (K/L), Analisis Renstra OPD Provinsi (Kabupaten/Kota) dan Analisis Renstra OPD Kabupaten. Hasil analisis kondisi sebagaimana berikut :

No.	Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan dinamis yanag relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lahan pertanian subur, komoditas unggulan	Produktivitas rendah, teknologi rendah	Transformasi Ekonomi Inklusif (Daya dukung dan ketahanan pangan terancam)	Krisis pangan dan degradasi lahan	Transformasi pertanian berkelanjutan	Produksi pangan belum stabil di Sulteng	Modernisasi pertanian dan penguatan ketahanan pangan
2	Ruang pertanian dan konektivitas wilayah	Infrastruktur pertanian dan jalan tidak terintegrasi	Transformasi Ekonomi Inklusif (Alih fungsi lahan dan tekanan ruang)	Urbanisasi dan tekanan ruang global	Penguatan kawasan penyangga IKN	Jalur konektivitas belum optimal	Penguatan konektivitas wilayah dan perlindungan ruang produksi
3	Keanekaragaman hayati, hutan, DAS	Deforestasi dan degradasi lingkungan	Penguatan Tata Kelola Wilayah yang Berkelanjutan (Penurunan kualitas ekosistem)	Perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman	Pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Deforestasi di DAS Palu dan Lariang	Konservasi sumber daya alam dan penguatan daya dukung lingkungan
4	Potensi energi terbarukan (air, surya)	Rendahnya pemanfaatan EBT	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Ketergantungan energi fosil)	Krisis energi dan transisi global	Transisi energi bersih	Infrastruktur listrik desa terbatas	Pemanfaatan energi terbarukan untuk desa dan wilayah terpencil
5	Jalur strategis ke IKN	Konektivitas dan logistik belum optimal	Penguatan Tata Kelola Wilayah yang Berkelanjutan (Tekanan pembangunan ruang)	Urbanisasi dan pembangunan kawasan penyangga	Konektivitas wilayah IKN	Akses jalan belum merata di Sigi	Penguatan konektivitas dan kesiapan sebagai hinterland IKN
6	Wisata alam dan budaya	Akses terbatas, promosi rendah	Transformasi Ekonomi Inklusif (Daya dukung wisata dan budaya terancam)	Homogenisasi budaya, degradasi ekowisata	Pariwisata berbasis budaya dan alam	Potensi wisata belum tergarap maksimal	Pengembangan pariwisata berkelanjutan

No.	Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan dinamis yanag relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
							berbasis budaya dan lokalitas
7	Populasi usia produktif tinggi	Pengangguran dan minim pelatihan kerja	Transformasi Ekonomi Inklusif (Kesenjangan ekonomi dan sosial)	Ketimpangan SDM secara global	Optimalisasi bonus demografi	SDM belum tersertifikasi	Penguatan SDM dan penciptaan lapangan kerja produktif
8	Komunitas adat aktif dan kearifan lokal	Belum terlibat dalam proses pembangunan	Penguatan Ketahanan Sosial (Ketimpangan peran sosial dan budaya)	Inklusi sosial dan budaya	Pengarusutamaan budaya lokal	Partisipasi komunitas adat terbatas	Pemberdayaan komunitas adat dan kearifan lokal dalam pembangunan
9	Air bersih melimpah namun belum optimal	Distribusi layanan tidak merata, kualitas buruk	Penyediaan Aksesibilitas Dasar (Ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan)	Krisis air global dan kelangkaan sumber air	Layanan dasar air dan sanitasi	Akses air bersih terbatas di beberapa kecamatan	Peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi berbasis desa
10	Wilayah rawan bencana	Minim mitigasi dan adaptasi bencana	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Risiko bencana tinggi dan berulang)	Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana	Ketangguhan dan kesiapsiagaan bencana	Wilayah rawan di Sulawesi Tengah	Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tata ruang responsif
11	Tingginya prevalensi stunting	Sanitasi dan gizi buruk, pelayanan tidak merata	Penguatan Ketahanan Sosial (Beban kesehatan jangka panjang)	Ketimpangan layanan kesehatan global	Percepatan penurunan stunting	Angka stunting tinggi di desa terpencil	Percepatan penurunan stunting dan penguatan sistem kesehatan dasar

No.	Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan dinamis yanag relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Lahan kritis dan potensi agroforestri	Pertanian ekstensif tanpa konservasi	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Daya dukung tanah menurun)	Degradasi tanah dan krisis ketahanan ekosistem	Rehabilitasi DAS dan konservasi tanah	DAS Lariang dan Palu terancam erosi	Rehabilitasi lahan kritis dan pengembangan sistem agroforestri
13	Fragmentasi antar wilayah dan instansi	Koordinasi pembangunan belum sinkron	Penguatan Tata Kelola Wilayah yang Berkelanjutan (Ketidakterpaduan perencanaan ruang dan sosial)	Ketimpangan wilayah	Perencanaan lintas sektor dan wilayah	Isu konektivitas antar kabupaten	Kolaborasi dan sinergi pembangunan wilayah terpadu
14	Minimnya pelibatan masyarakat inklusi	Kelompok rentan tidak dilibatkan secara bermakna	Penguatan Ketahanan Sosial (Kesenjangan akses sosial dan program pembangunan)	Isu hak asasi dan partisipasi global	Pembangunan inklusif dan setara	Representasi kelompok rentan masih terbatas	Penguatan peran masyarakat inklusi dalam pembangunan
15	Potensi hutan adat dan perhutanan sosial	Akses belum legal, belum ada pendampingan	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Ketimpangan akses dan distribusi pemanfaatan hutan)	Ketidakadilan ekologis dan sosial	Reforma agraria dan perhutanan sosial	Masih rendahnya implementasi di daerah	Penguatan kelembagaan perhutanan sosial dan hutan adat
16	Emisi GRK sektor lahan dan energi tinggi	Emisi dari transportasi, pembukaan lahan	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Gas rumah kaca dan pemanasan global)	Target net-zero dan pembangunan rendah karbon	Penurunan emisi sektor energi dan kehutanan	Belum adanya roadmap GRK daerah	Pengendalian GRK dan pembangunan rendah karbon berbasis wilayah

No.	Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan dinamis yanag relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Terbatasnya inovasi pembiayaan pembangunan	Keterbatasan fiskal dan investasi hijau rendah	Penguatan Tata Kelola Wilayah yang Berkelanjutan (Keterbatasan pembiayaan infrastruktur dan sosial)	Green finance dan blended finance global	Skema KPBU dan pembiayaan alternatif	Minimnya inisiatif PPP dan BUMDes investasi	Blending finance dan pembiayaan berkelanjutan untuk infrastruktur hijau
18	Pemulihan ekonomi belum berbasis ekosistem	Pendekatan pertumbuhan belum menyentuh keberlanjutan	Transformasi Ekonomi Inklusif (Ketidakseimbangan antara ekonomi dan lingkungan)	Ekonomi restoratif dan ekonomi hijau	Ekonomi hijau dan inklusif	UMKM hijau belum berkembang optimal	Penguatan ekonomi restoratif berbasis komunitas dan lingkungan
19	Riset dan pengambilan kebijakan	Minim evidence-based policy	Perlindungan Ekologi dan Ketahanan Iklim (Tidak berbasis data lingkungan)	Evidence-based global governance	Data driven planning & kebijakan	Belum terbangun sistem riset daerah	Penguatan riset dan inovasi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan publik
20	Kualitas pelayanan publik dan birokrasi	Good governance belum optimal	Penguatan Tata Kelola Wilayah yang Berkelanjutan (Tata kelola tidak transparan)	Agenda transparansi global	Reformasi birokrasi dan SPBE	Kapasitas ASN daerah terbatas	Tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel
21	Infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan	Ketimpangan antarwilayah	Penguatan Ketahanan Sosial (Ketimpangan layanan dasar)	Akses layanan dasar global tidak merata	Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	Akses pedesaan rendah	Pemerataan layanan dasar dan afirmasi wilayah pinggiran

6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dengan kondisi dan perkembangan transportasi pada saat ini Dinas Perhubungan perlu untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan serta mengembangkan sarana prasarana transportasi, antara lain :

- A. Meningkatkan kondisi kendaraan angkutan umum yang lebih baik dan nyaman;
- B. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang terjadwal dan terintegrasi;
- C. Meningkatkan Pengelolaan manajemen perparkiran di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir menjadi lebih baik;
- D. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan diklat teknis di bidang transportasi;
- E. Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang transparan dan akuntabel.

Tantangan atas kondisi dan perkembangan tersebut memang perlu untuk ditindaklanjuti mengingat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Sigi saat ini mempunyai peluang untuk berkembang lebih pesat karena tidak terlepas dari pembangunan dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur yang dilakukan jauh lebih baik dan didukung adanya Tambatan Perahu dan Kapal Yang ada di Kecamatan Lindu.

Perbaikan di dalam pemerintahan sendiri sudah jauh lebih baik dengan dikembangkannya fasilitas - fasilitas penunjang kerja yang lebih modern dan menggunakan teknologi informatika sesuai perkembangan saat ini.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sigi dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Sigi untuk peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah terdiri atas:

- A. mengembangkan sistem jaringan penghubung antar wilayah darat, dan Sungai pada PKN, PKW, dan PKL;
- B. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung antar pusat produksi pertanian dan pariwisata,dengan PKN, PKW, dan PKL;
- C. mengembangkan prasarana pertanian dan pariwisata;
- D. mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi guna mendukung sektor pertanian;
- E. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;

- F. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sigi; dan
- G. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah lainnya.

7. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal ini disesuaikan dengan rumusan Permendagri 67/2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2030

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten Sigi.

Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil utama yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan, berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030:

TABEL 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sigi tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(	(	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(1)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan											
- Meningkatkan Layanan Transportasi yang nyaman Aman dan Terjangkau	Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	-	54,06	55,14	56,24	57,37	58,52	59,69	
		Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	-	54	55	56	57	58	59	
		meningkatkan efektifitas administrasi kesekretariat an	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	B	B	BB	BB	BB	A	

	Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	-	25	30	35	40	45	50	
	meningkatkan efektivitas administrasi kesekretariatan	Persentase Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan (%)	-	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatkan kualitas layanan transportasi Sungai / Danau	Konektivitas sungai/danau (%)	-	65	70	75	80	85	90	
		Jumlah retribusi sektor penyeberangan danau (Angka)	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	

Sumber : SIPD Bangda

3.2 STRATEGI RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2030

Pentahapan Pembangunan Rencana Strategis adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada table dibawah ini :

TABEL 3. 2
Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas masyarakat diperkotaan maupun perdesaan di seluruh pelosok Kabupaten Sigi.	penanganan keselamatan melalui manajemen aman, system aman, Masyarakat aman, kendaraan aman, dan jalan aman.	Sinkronisasi Perencanaan dan Koordinasi Pemerintahan Evaluasi dan perbaikan koordinasi antar pemerintahan, penyusunan jadwal pembangunan yang jelas, serta meningkatkan pengawasan melalui kolaborasi masyarakat.	Penyempurnaan Proses dan Pengawasan Memperkuat kolaborasi pemerintah-masyarakat, meningkatkan kemampuan aparat melalui pelatihan lanjutan, dan mempercepat implementasi proyek dengan koordinasi yang lebih baik.	Optimalisasi dan Keberlanjutan Evaluasi keseluruhan program, penyusunan rencana perbaikan, dan memastikan keberlanjutan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPERIDA KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi 2025-2029 difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, kolaborasi masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan yang tepat waktu. Selain itu, penerapan teknologi dan riset dalam perencanaan pembangunan juga menjadi prioritas utama. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan universitas, diharapkan tercipta solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan daerah, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Tabel berikut memuat rinciannya mengenai operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

TABEL 3. 3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
		Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	- Penataan dan peningkatan layanan angkutan umum untuk memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi masyarakat. - Peningkatan keselamatan transportasi melalui pengujian kendaraan bermotor dan penyediaan sarana prasarana pendukung	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 mengarah pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan riset dan inovasi. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan efektivitas perencanaan dan penerapan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan hasil riset yang berbasis data dan inovasi. Dengan menciptakan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga riset, dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai sektor.

Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah operasionalisasi kebijakan dan pencapaian yang diharapkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi.

Tabel 4. 1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapperida Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN /	KETERANGAN
(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan							
- Meningkatnya Layanan Transportasi yang nyaman Aman dan Terjangkau	Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat			Rasio konektivitas		
					Konektivitas Darat		
					Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah		
			Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat		Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Idea (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

				Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	

					Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	

					Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	2.15.02.2.03.00 01 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
--	--	--	--	--	--	--	--

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN /	KETERANGAN
(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	

		meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan			Persentase Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan (%)		
			Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Terlaksananya kelancaran administrasi kesekretariatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
--	--	--	--	--	---	---	--

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN /	KETERANGAN
(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah	2.15.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data	
--	--	--	--	--	--	--	--

NSPK DAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /	KETERANG
(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.15.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
--	--	--	--	--	---	---	--

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN /	KETERANGAN
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

--	--	--	--

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya kelancaran administrasi kesekretariatan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

--	--	--	--

Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
--	--	--	--	--	--	---	--

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN /	KETERANGAN
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2.15.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.15.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.15.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	

					Jumlah Dokumen Ketetapan	2.15.01.2.04.0006 - Penetapan	
					Retribusi Daerah (Dokumen)	Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan	2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan	
					Retribusi Daerah (Dokumen)	Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya administrasi kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

			Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN /	KETERANGAN
(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

--	--	--	--

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terselenggaranya administrasi kesekretariatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

--	--	--	--

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN /	KETERANG
0	0	0	0	0	0	0	0
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

--	--	--	--

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN /	KETERANGAN
(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0	(0
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

						2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		Meningkatkan kualitas layanan transportasi Sungai / Danau			Konektifitas		
					Jumlah retribusi		
			Meningkatkan kualitas layanan transportasi Sungai / Danau		Konektifitas sungai/danau (%)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
					Jumlah retribusi sektor penyeberangan danau (Angka)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	

		Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.04 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya layanan transportasi Sungai / Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN /	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

					Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : SIPD Bangda

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Rencana Strategis Dians Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan pengendalian, tetapi juga evaluasi yang terstruktur untuk mengukur pencapaian hasil dan kinerja pembangunan secara menyeluruh. Fokus utama adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta kolaborasi antar berbagai sektor dan stakeholders.

Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini akan difokuskan pada keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah yang melibatkan analisis data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, sistem informasi dan pengelolaan data juga akan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Renstra Bapperida Kabupaten Sigi untuk periode 2026-2030, yang menggambarkan target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan untuk setiap tahunnya.

Tabel 4. 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCO ME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 202 4	TARGET DAN PAGU										PERAN GKAT DAER AH	KETERA NGAN
			202		202		202		202		203			
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		
(0)	(0)	(0)	(04)	(0)	(06)	(0)	(08)	(0)	(10)	(11)	(12)	(1)	(1)	(1)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				6.315.09 8.580		6.441.40 0.552		9.570.22 8.563		6.701.63 3.133		6.835.66 5.796		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A				4.601.17 4.398		4.693.19 7.886		7.787.06 1.844		4.882.80 3.080		4.980.45 9.142		

Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan				4.601.174.398		4.693.197.886		7.787.061.844		4.882.803.080		4.980.459.142	2.15.0.00.0.00.01.00 - Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya kelancaran administrasi kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektor al Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingk up Perangkat Daerah (Data)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara n Walidata Pendukung Statistik Sektor al Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET DAN PAGU										PERAN	KETERA
			202		202		202		202		203			
			TAR	PA	TAR	PA	TAR	PA	TAR	PA	TAR	PA		
(0	(0	(0	(04)	(0	(06)	(0	(08)	(0	(10)	(11	(12)	(1	(1	
2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		
2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		
2.15.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		

2.15.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		
--	--	---	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCO ME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 202 4	TARGET DAN PAGU										PERAN GKAT DAER AH	KETERA NGAN
			202		202		202		202		203			
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		
(0)	(0)	(0)	(04)	(0)	(06)	(0)	(08)	(0)	(10)	(11)	(12)	(1)	(1)	(1)
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.924.35 4.292		3.924.35 4.292		3.924.35 4.292		3.924.35 4.292		3.924.35 4.292		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	-	3	3.924.3 54.292	3	3.924.3 54.292	3	3.924.3 54.292	3	3.924.3 54.292	3	3.924.3 54.292		

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	4 5		4 5		4 5		4 5		4 5			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.809.354.292		3.809.354.292		3.809.354.292		3.809.354.292		3.809.354.292		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	45	3.809.354.292	45	3.809.354.292	45	3.809.354.292	45	3.809.354.292	45	3.809.354.292		
2.15.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
2.15.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
2.15.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000 .000		10.000 .000		10.000 .000		10.000 .000		10.000 .000		
--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCO ME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 202 4	TARGET DAN PAGU										PERAN GKAT DAER AH	KETERA NGAN
			202		202		202		202		203			
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		
(0	(0	(0	(04)	(0	(06)	(0	(08)	(0	(10)	(11	(12)	(1	(1	(1
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	-	3	10.000 .000	3	10.000 .000	3	10.000 .000	3	10.000 .000	3	10.000 .000		
2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000 .000		20.000 .000		20.000 .000		20.000 .000		20.000 .000		

Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.03.0006 -				10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.01.2.04 -				30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		

Terlaksananya kelancaran administrasi kesekretariatan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCO ME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 202 4	TARGET DAN PAGU										PERAN GKAT DAER AH	KETERA NGAN
			202		202		202		202		203			
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		
(0)	(0)	(0)	(04)	(0)	(06)	(0)	(08)	(0)	(10)	(11)	(12)	(1)	(1)	(1)
2.15.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		
2.15.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		

Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Terlaksananya administrasi kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		

2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				220.00 0.000		320.00 0.000		420.00 0.000		420.00 0.000		420.00 0.000		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	220.00 0.000	1	320.00 0.000	1	420.00 0.000	1	420.00 0.000	1	420.00 0.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	-	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCO ME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 202 4	TARGET DAN PAGU										PERAN GKAT DAER AH	KETERA NGAN
			202		202		202		202		203			
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		
(0)	(0)	(0	(04)	(0	(06)	(0	(08)	(0	(10)	(11	(12)	(1	(1	(1
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000		

2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000 .000		20.000 .000		20.000 .000		20.000 .000		20.000 .000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1	20.000 .000	1	20.000 .000	1	20.000 .000	1	20.000 .000	1	20.000 .000		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000 .000		50.000 .000		50.000 .000		50.000 .000		50.000 .000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	1	50.000 .000	1	50.000 .000	1	50.000 .000	1	50.000 .000	1	50.000 .000		
2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		

Tersedianya Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	-	1	5.000.	1	5.000.	1	5.000.	1	5.000.	1	5.000.		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	1	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
2.15.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		
Terselenggaranya administrasi kesekretariatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			

	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCO ME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 202 4	TARGET DAN PAGU										PERAN GKAT DAER AH	KETERA NGAN
			202		202		202		202		203			
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		
(0)	(0)	(0)	(04)	(0	(06)	(0	(08)	(0	(10)	(11	(12)	(1	(1	(1
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000 .000		15.000 .000		15.000 .000		15.000 .000		15.000 .000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	15.000 .000	1	15.000 .000	1	15.000 .000	1	15.000 .000	1	15.000 .000		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		

2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		
2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.000 .000		65.000 .000		65.000 .000		65.000 .000		65.000 .000		

Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	-	1	65.000 .000	1	65.000 .000	1	65.000 .000	1	65.000 .000	1	65.000.000 25.000.000	
	Surat Menyurat (Laporan)												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	1										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	1										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	1		1		1		1		1		

2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.000 .000		25.000 .000		25.000 .000		25.000 .000				
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	1	25.000 .000	1	25.000 .000	1	25.000 .000	1	25.000 .000	1	25.000 .000		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.000 .000		20.000 .000		20.000 .000		20.000 .000		20.000 .000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	1	20.000 .000	1	20.000 .000	1	20.000 .000	1	20.000 .000	1	20.000 .000		
2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000 .000		10.000 .000		10.000 .000		10.000 .000		10.000 .000		

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah				256.820.106		248.843.594		3.242.707.552		338.448.788		436.104.850		

Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	1	256.82 0.106	1	248.84 3.594	1	3.242.70 7.552	1	338.44 8.788	1	436.10 4.850		
--	--	---	---	-----------------	---	-----------------	---	-------------------	---	-----------------	---	-----------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCO ME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 202 4	TARGET DAN PAGU										PERAN GKAT DAER AH	KETERA NGAN
			202		202		202		202		203			
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		
(0	(0	(0	(04)	(0	(06)	(0	(08)	(0	(10)	(11	(12)	(1	(1	(1
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	1		1		1		1		1			

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.00 0.000		150.00 0.000		150.00 0.000		150.00 0.000		150.00 0.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	1	150.00 0.000	1	150.00 0.000	1	150.00 0.000	1	150.00 0.000	1	150.00 0.000		

2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		5.000. 000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000	1	5.000. 000		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000		

2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.820 .106		63.843 .594		3.057.70 7.552		153.44 8.788		251.10 4.850		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	71.820 .106	1	63.843 .594	1	3.057.70 7.552	1	153.44 8.788	1	251.10 4.850		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.413.92 4.182		1.442.20 2.666		1.471.04 6.719		1.500.46 7.653		1.530.47 7.006		
Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	-	5 5	1.413.9 24.182	5 6	1.442.2 02.666	5 7	1.471.0 46.719	5 8	1.500.4 67.653	5 9	1.530.4 77.006	2.15.0.00.0. 00.01.00 00 - Dinas	

	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	-	30		35		40		45		50		Perhubungan	
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	-	5	60.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000		
2.15.02.2.02.000 2 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	-	5	60.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000		

2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				748.92 4.182		762.20 2.666		776.04 6.719		790.46 7.653		805.47 7.006		
--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET DAN PAGU										PERAN	KETERA
			202		202		202		202		203			
			TAR	PA	TAR	PA	TAR	PA	TAR	PA	TAR	PA		
(0	(0	(0	(04)	(0	(06)	(0	(08)	(0	(10)	(11)	(12)	(1	(1	(1
Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	-	1	748.92 4.182	1	762.20 2.666	1	776.04 6.719	1	790.46 7.653	1	805.47 7.006		
	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	1	1		1				1		1			
	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	-	1		1		1		1		1			

2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C				50.000 .000		50.000 .000		50.000 .000		50.000 .000		50.000 .000		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	1	1	50.000 .000	1	50.000 .000		50.000 .000	1	50.000 .000	1	50.000 .000		
2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				50.000 .000		50.000 .000		50.000 .000		50.000 .000		50.000 .000		
Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	-	1	50.000 .000	1	50.000 .000	1	50.000 .000	1	50.000 .000	1	50.000 .000		

2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				548.92 4.182		562.20 2.666		576.04 6.719		590.46 7.653		605.47 7.006		
Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	-	1	548.92 4.182	1	562.20 2.666	1	576.04 6.719	1	590.46 7.653	1	605.47 7.006		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				100.00 0.000		100.00 0.000		100.00 0.000		100.00 0.000		100.00 0.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	-	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000		

2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				300.00 0.000		300.00 0.000		300.00 0.000		300.00 0.000		300.00 0.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	-	1	300.00 0.000	1	300.00 0.000	1	300.00 0.000	1	300.00 0.000	1	300.00 0.000		
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				300.00 0.000		300.00 0.000		300.00 0.000		300.00 0.000		300.00 0.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	-	1	300.00 0.000	1	300.00 0.000	1	300.00 0.000	1	300.00 0.000	1	300.00 0.000		

2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				305.00 0.000		310.00 0.000		315.00 0.000		320.00 0.000		325.00 0.000		
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	-	1	305.00 0.000	1	310.00 0.000	1	315.00 0.000	1	320.00 0.000	1	325.00 0.000		
2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				305.00 0.000		310.00 0.000		315.00 0.000		320.00 0.000		325.00 0.000		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	-	1	305.00 0.000	1	310.00 0.000	1	315.00 0.000	1	320.00 0.000	1	325.00 0.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCO ME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 202 4	TARGET DAN PAGU										PERAN GKAT DAER AH	KETERA NGAN
			202		202		202		202		203			
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		
(0)	(0)	(0	(04)	(0	(06)	(0	(08)	(0	(10)	(11	(12)	(1	(1	(1
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				300.00 0.000		306.00 0.000		312.12 0.000		318.36 2.400		324.72 9.648		
Meningkatkan kualitas layanan transportasi Sungai / Danau	Jumlah retribusi sektor penyeberangan danau (Angka)	-	100.0 00.00 0	300.00 0.000	100.0 00.00 0	306.00 0.000	100.0 00.00 0	312.12 0.000	100.0 00.00 0	318.36 2.400	100.0 00.00 0	324.72 9.648	2.15.0.00.0. 00.01.00 00 - Dinas Perhubunga n	
	Konektifitas sungai/danau (%)	-	7 0		7 5		8 0		8 5		9 0			

2.15.03.2.04 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota				200.00 0.000		206.00 0.000		212.12 0.000		218.36 2.400		224.72 9.648		
Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		1	200.00 0.000	1	206.00 0.000	1	212.12 0.000	1	218.36 2.400	1	224.72 9.648		

2.15.03.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani				200.00 0.000		206.00 0.000		212.12 0.000		218.36 2.400		224.72 9.648		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		1	200.00 0.000	1	206.00 0.000	1	212.12 0.000	1	218.36 2.400	1	224.72 9.648		
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				100.00 0.000		100.00 0.000		100.00 0.000		100.00 0.000		100.00 0.000		

Terlaksananya layanan transportasi Sungai / Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	-	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000		
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	-	1		1		1		1		1			

2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau				30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	-	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000		
2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				40.000 .000		40.000 .000		40.000 .000		40.000 .000		40.000 .000		

Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	-	1	40.000 .000	1	40.000 .000	1	40.000 .000	1	40.000 .000	1	40.000 .000		
---	---	---	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET DAN PAGU										PERAN	KETERA
			202		202		202		202		203			
			TAR	PA	TAR	PA	TAR	PA	TAR	PA	TAR	PA		
(0)	(0)	(0)	(04)	(0	(06)	(0	(08)	(0	(10)	(11)	(12)	(1	(1	(1
2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		30.000 .000		
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	-	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000	1	30.000 .000		

Sumber : SIPD Bangda

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 telah merumuskan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, program prioritas ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sub kegiatan yang diidentifikasi dalam Renstra ini difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta koordinasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis kondisi daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah, musrenbang, serta penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Pentingnya penguatan riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah juga menjadi prioritas dalam sub kegiatan ini. Dengan meningkatkan kapasitas riset dan pengembangan yang berbasis bukti, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap permasalahan daerah dan potensi unggulan yang ada.

Tabel berikut ini merinci sub kegiatan prioritas yang akan dijalankan, dengan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, analisis data, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan riset dan inovasi untuk mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2026 - 2030.

Tabel 4. 3
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

NO	PROGR AM PRIORI	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(	(03)	(04)	(05)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
1.	2.15.02 - PROGRA M PENYELE NGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUT AN JALAN (LLAJ)	Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	RAKORTEK
			2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Program Unggulan Nomor 1. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas.
			2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Program Unggulan Nomor 1. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas.
			2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Program Unggulan Nomor 1. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas.

			2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	RAKORTEK
2.	2.15.03 - PROGR AM PENGE LOLAA N PELAY ARAN	Meningkatkan kualitas layanan transportasi Sungai / Danau	2.15.03.2.04 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Unggulan Nomor 1. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas.
			2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	RAKORTEK
			2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Program Unggulan Nomor 1. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas.
			2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	RAKORTEK

Sumber : SIPD Bangda

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan utama untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah. IKU ini menjadi alat ukur yang penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diimplementasikan dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU yang digunakan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 mencakup dua indikator utama, yaitu **Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah** dan **Indeks Inovasi Daerah**. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah mengukur kualitas dan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan, sedangkan Indeks Inovasi Daerah mengukur sejauh mana inovasi yang diterapkan dapat mendukung pengembangan daerah, baik dari aspek pemerintahan, ekonomi, maupun sosial.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja masing-masing indikator untuk tahun 2025 hingga 2030, dengan harapan bahwa setiap tahun akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas perencanaan dan penerapan inovasi yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Bapperida Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan									
2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	-	54,06	55,14	56,24	57,37	58,52	59,69	

Sumber : SIPD Bangda

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030, penggunaan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** merupakan bagian yang sangat vital untuk memonitor progres dan efektivitas implementasi kebijakan serta program pembangunan daerah. IKK ini dirancang untuk mengukur seberapa baik kinerja setiap elemen yang terlibat dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan inovasi di tingkat daerah.

Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Renstra ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari keselarasan antara RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, hingga penerapan hasil kajian berbasis bukti dalam kebijakan pembangunan daerah. Penekanan pada keselarasan antar dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra PD, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis dengan baik, serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Selain itu, penekanan pada riset dan inovasi sebagai bagian dari pengembangan potensi unggulan daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Dengan menggunakan IKK ini, Bapperida Kabupaten Sigi akan dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, serta memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja untuk setiap indikator yang direncanakan dari tahun 2026 hingga 2030. Pencapaian target-target ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Bapperida Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	positif	%	-	54,06	55,14	56,24	57,37	58,52	59,69	
3	Konektivitas Darat	positif	Persentase	-	54	55	56	57	58	59	
4	Persentase Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	
5	Konektifitas sungai/danau	positif	%	-	65	70	75	80	85	90	
6	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap K	positif	Persentase	-	25	30	35	40	45	50	
7	Jumlah retribusi sektor penyeberangan danau	positif	Angka	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	

Sumber : SIPD Bangda

BAB V PENUTUP

Secara umum, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2029 merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi

Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Semoga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi ini dapat menggambarkan dan menjabarkan visi RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan yaitu **“KABUPATEN SIGI MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA”**.

Sigi, 30 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIGI,**



DODOT PINARSO, S.Sos. MT
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19701113 199012 1 001



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI**